

**BAHASA DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT DI
INDONESIA
(TEORI BREAK DAN LINGUISTIK FORENSIK)**

Oleh

Meksi Rahma Nesti*

meksirahma@gmail.com

Abstrak

Bahasa dan Kebijakan Pembangunan Kelapa Sawit Di Indonesia, menggunakan teori BREAK dan kajian analisis kebijakan berdimensi linguistik forensik dalam pemecahan masalah bahasa dan kebijakan pembangunan kelapa sawit tersebut. BREAK adalah akronim dari *Basis Wacana, Relasi Wacana, Ekuilibrium Wacana, Aktualisasi Wacana, dan Keberlanjutan Wacana*. Teori BREAK adalah teori yang diciptakan oleh Sawirman atas kegagalan dialektika Kant(ian), Hegelian, dan Marx(ian) dalam memetakan tipologi pergerakan dan struktur perubahan realitas dan wacana secara akomodatif. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena linguistik seiring dengan melihat pergerakan esensi dan spirit wacana. Analisis kebijakan berdimensi linguistik forensik membutuhkan pengetahuan dan pemahaman berbagai multidisiplin ilmu. Relasi bahasa, hukum, dan strategi politik merupakan variabel utama dalam kajian analisis kebijakan berdimensi linguistik forensik.

Hasil dari penelitian ini, esensi wacana primer adalah perencanaan mengenai pembangunan kelapa sawit agar lebih baik kedepannya. Esensi wacana sekunder adalah berita mengenai konflik pembangunan kelapa sawit yang tidak berjalan dengan baik. Spirit dari wacana primer adalah membuat perubahan yang lebih baik, sedangkan spirit dari wacana sekunder adalah informasi yang menunjukkan kebijakan yang telah dikeluarkan tidak berjalan dengan baik di lapangan. Selanjutnya, pada analisis kebijakan berdimensi linguistik forensik, terjadi penyusupan atau tindak pelaku kejahatan dalam pembuatan dan penetapan kebijakan pembangunan kelapa sawit. Sehingga, pada prakteknya di lapangan, pembangunan kelapa sawit banyak terjadi konflik.

Kata kunci: wacana, kebijakan, esensi, spirit, BREAK, linguistik forensik

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kebijakan atau peraturan yang akan diambil oleh setiap orang, baik pemerintahan maupun organisasi, kelompok maupun perorangan, hendaknya mampu bersifat adil dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Masalah kebijakan yang telah diambil dan tidak sesuai yang terjadi di lapangan, adalah masalah yang tidak habisnya di negara ini. Baik di Indonesia maupun negara-negara di belahan dunia lainnya. Sebab, setiap kebijakan itu diambil, terkadang terjadi penyusupan-penyusupan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok kecil dari masyarakat atau pengikutnya. Seperti pada kasus pembangunan kelapa sawit di Pasaman Barat dan dibeberapa daerah lainnya. Lahan sawit di Pasaman

Barat, terjadi tidak merata dalam pembagian hasil, baik dari pemerintah, perusahaan, pemilik tanah (pribadi), maupun pemilik tanah ulayat. Terkadang, hanya orang-orang yang berkuasa saja yang mendapat pembagian hasil. Sedangkan, orang biasa/masyarakat biasa yang tanahnya juga dipakai untuk lahan, tidak diberi atau tidak diperhitungkan sama sekali.

Hal yang demikian, menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam sebuah pemerintahan atau negara, perusahaan/organisasi maupun kelompok, ninik mamak maupun kemenakan dan pihak yang sekaum. Hal tersebut, tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab sudah merugikan berbagai pihak dan hanya menguntungkan beberapa pihak dan akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Setiap kebijakan yang diambil oleh penguasa/pemimpin atau pemerintah, hendaknya tidak merugikan siapapun. Seperti yang dikemukakan oleh Sawirman, dkk., kebijakan yang paling ideal adalah yang tidak merugikan masyarakat dan tidak merugikan negara dalam tataran strategi (jangka panjang). Rancangan kebijakan harus berbasis pada pengendalian faktor-faktor terkait untuk mencapai atau menciptakan ekuilibrium atau kesetaraan. Bukan memanipulasi faktor-faktor tersebut untuk tujuan sepihak atau keuntungan segelintir jaringan dan kelompok (2015:65).

Masih banyak persoalan perkebunan sawit di Indonesia, yang tidak menguntungkan masyarakat setempat. Artinya, terjadi ketimpangan sosial di daerah tersebut. Padahal, dalam salah satu tujuan dari pembangunan kelapa sawit di Indonesia yang dibuat oleh Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), adalah *cakupan tujuan pembangunan perkebunan meliputi peningkatan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, devisa negara dari subsektor perkebunan, penyediaan bahan baku bagi industri pangan dan non-pangan termasuk biodiesel, pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah.*

Namun, pada kenyataannya yang terjadi pada saat ini, begitu banyak terjadi konflik pembangunan kelapa sawit, baik antara pemerintah dengan masyarakat, baik perusahaan dan pemilik tanah, pembagian hasil yang tidak merata, pembuangan limbah sawit, dan isu lainnya. Dalam artiannya, apa yang menjadi tujuan pemerintahan tidak

berjalan baik. Maka dari itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Namun, tampaknya kebijakan yang dikeluarkan atau yang diambil tidak berjalan dengan baik. Bisa jadi, disalah gunakan dan disalah artikan bagi kelompok tertentu pada prakteknya di lapangan.

Pada dasarnya kebijakan merupakan bentuk implementasi strategi dalam mengendalikan variabel atau faktor realitas. Pada dasarnya analisis kebijakan ini harus berlandaskan pada pengukuran yang akurat terhadap kondisi yang ideal serta faktor-faktor yang harus dikendalikan oleh kebijakan untuk mencapai kondisi ideal tersebut. Adanya pemikiran yang jahat atau pikiran kejahatan menyusup dan pelaku yang berkepentingan sepihak maupun kepentingan ganda merupakan ancaman yang merusak keseimbangan yang seharusnya dapat dicapai oleh kebijakan. Kondisi yang dikatakan seimbang, bila tidak berpihak atau tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Maka dari itu, perlunya menganalisis kebijakan yang diambil oleh pemerintahan atau Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Apakah suatu kebijakan tersebut tidak disusupi atau iya? Mengapa kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kebijakan itu sendiri? Mengapa masih banyak isu serta konflik yang terjadi pada kasus pembangunan kelapa sawit? Oleh sebab itu, linguistik forensik hadir untuk memecahkan masalah tersebut dengan dibantu oleh teori BREAK untuk melihat apa yang terjadi dibalik kebijakan serta isu yang beredar dalam masyarakat.

1.2.TEORI

Linguistik merupakan bidang ilmu pengetahuan yang memiliki otoritas dalam analisis seluk beluk bahasa, sedangkan kebijakan merupakan kumpulan teks bahasa yang diinstitusikan atau dilembagakan dan memiliki dimensi politik beserta kekuasaan (Sawirman, dkk., 2015:67). Teks atau wacana merupakan salah satu konstruksi linguistik yang paling kompleks. Berdasarkan hal tersebut, masuk akal mengapa analisis kebijakan seharusnya juga melibatkan linguistik, bukan hanya ahli hukum saja. Mengingat teks politik mengenai kebijakan berpotensi disusupi atau dieksploitasi oleh praktisi pembuatnya, maka analisis kebijakan layak menjadi salah satu cabang linguistik forensik yang memang

fokus membedah masalah bahasa dan kejahatan. Tentu saja analisis forensik membutuhkan pengetahuan dan pemahaman berbagai multidisiplin ilmu. Relasi bahasa, hukum, dan strategi politik merupakan variabel utama dalam kajian analisis kebijakan berdimensi linguistik forensik.

Ada beberapa variabel konseptual yang perlu difahami dalam melaksanakan analisis kebijakan berbasis linguistik forensik, seperti: (1) analisis orientasi kebijakan; (2) sifat dan karakteristik kebijakan; (3) tingkat bias (penyimpangan) lingual; (4) tingkat efektifitas dan efisiensi kebijakan terhadap aspek yang diregulasikan; (5) basis berfikir pelaku pembuat kebijakan; (6) evaluasi kelemahan kebijakan terkait dengan dinamika aspek yang dikontrol; dan (7) rekomendasi atau solusi untuk kebijakan atau untuk revisi kebijakan. Dalam konteks ini, metode analisis kata, frase, dan klausa merupakan kunci yang sangat diperlukan. Hal ini disebabkan, tingkat penyimpangan dalam suatu kebijakan sering dimainkan pada kata-kata kunci tertentu. Disamping itu, analisis linguistik forensik juga harus memahami aspek atau objek yang diregulasikan beserta sifat-sifat masalahnya secara komprehensif (Sawirman, dkk., 2015:67).

Analisis forensik hendaknya mampu mengidentifikasi kebijakan hingga aspek terdasar seperti orientasi utama kebijakan dan karakteristik masalah yang diregulasikan (Sawirman, dkk., 2015:69). Fase-fase analisis masalah yang dilakukan analisis linguistik forensik perlu memetakan efek suatu kebijakan baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi berdasarkan analisis perkembangan situasi (Sawirman, dkk., 2015:70). Sebuah kebijakan akan diuji ketika terjadinya masalah. Kebijakan yang dirancang dengan murni, tentu mencapai keseimbangan yang bersifat bisa memecahkan masalah dan lebih efektif ketika dibenturkan pada kerumitan pemersalahan. Namun, jika bahasa sebagai landasan telah bermain dalam sebuah kebijakan, maka keseimbangan antara masalah dan kebijakan menjadi rusak. Oleh sebab itu, analisis orientasi kebijakan diperlukan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan dan potensi kelemahan kebijakan tersebut.

Hal lain yang juga perlu dilakukan adalah menganalisis sejumlah konstruksi lingual yang menunjukkan ambiguitas makna dalam sebuah regulasi, sehingga memungkinkan multi-interdisipliner bisa terjadi. Proses pengambilan kebijakan dan posisi pelaku-pelaku juga perlu dipetakan dalam analisis forensik. Lebih jauh, proses analisis kebijakan juga perlu memetakan pihak-pihak yang paling diuntungkan dan yang

paling dirugikan jika ditemukan orientasi pikiran kejahatan dalam kebijakan tersebut (Sawirman, dkk., 2015:70).

Umumnya kebijakan rentan dimainkan atau disusupi oleh para pelaku curang, adalah kebijakan yang berhubungan dengan komoditas-komoditas yang mendatangkan keuntungan melimpah, baik dunia bisnis, perkebunan, pertambangan dan lain-lain maupun dalam memperpanjang kontrak perusahaan-perusahaan asing. Perlu difahami, salah satu bentuk kejahatan yang paling berbahaya adalah kejahatan yang dilegalkan dalam kebijakan-kebijakan resmi. Pada umumnya modus lingual yang dikembangkan untuk memenuhi objektivitas kejahatan pada level ini adalah kata-kata kunci tertentu yang sengaja dibiarkan atau dibelokan sehingga bersifat multi-interpretasi (Sawirman, dkk., 2015:71).

BREAK adalah akronim dari *Basis Wacana, Relasi Wacana, Ekuilibrium Wacana, Aktualisasi Wacana, dan Keberlanjutan Wacana*. Teori BREAK adalah teori yang diciptakan oleh Sawirman atas kegagalan dialektikan Kant(ian), Hegelian, dan Marx(ian) dalam memetakan tipologi pergerakan dan struktur perubahan realitas dan wacana secara akomodatif. Teori BREAK disebut juga dengan teori pergerakan wacana e-135 (Sawirman, 2014:10). Teori BREAK adalah teori yang bertujuan menjelaskan fenomena linguistik seiring dengan melihat pergerakan esensi dan spirit wacana (Sawirman, 2014:43). Dalam tulisan ini, memakai teori BREAK untuk melihat spirit dan esensi dari wacana kebijakan dan berita yang dikeluarkan oleh situs *online*.

1.3. METODE

Menurut Sawirman, dkk., ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk menganalisis bahasa regulasi atau kebijakan. Hal pertama yang perlu ditemukan adalah bias bahasa atau lingual dan potensi bias dari kebijakan. Dalam konteks ini beberapa metode bisa dipakai, bahkan bisa digabungkan, seperti metode analisis interfaktor atau intervariabel, inter-evidensi, analisis proyeksi pada pikiran kebijakan ketika dibenturkan dengan faktor-faktor konflik, analisis ancaman, dan analisis strategi (strategi dan solusi kebijakan, serta faktor-faktor yang dimanipulasi). Analisis dimensi strategi memang membutuhkan pengkorelasi beberapa metode. Dalam analisis kebijakan, observasi yang akurat, terukur, holistik, dan mendalam diperlukan untuk mengumpulkan data-data

empiris. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari analisis dari *mirror image*, yaitu prasangka atau keyakinan analisis secara sepihak sebelum menganalisis faktor-faktor di lapangan secara akurat. Observasi langsung ke lapangan dimana masalah berkembang dan kebijakan gagal mutlak diperlukan untuk mengumpulkan data empiris dan mereduksi potensi *mirror image* analisis linguistik forensik. Struktur masalah mulai dari yang tampak dan yang tersembunyi harus difahami secara komprehensif, detail dan mendalam. Parameter dan karakteristik masalah di lapangan merupakan materi utama dalam pengembangan dan evaluasi kebijakan (2015:68).

Namun, pada artikel memakai analisis proyeksi pada pikiran kebijakan ketika dibenturkan dengan faktor-faktor konflik yang dibantu oleh teori BREAK untuk melihat esensi dan spirit dari kebijakan dan wacana yang berkembang. Metode analisis proyeksi adalah metode analisis berdasarkan upaya-upaya analisis berpikir seakan-akan seperti pelaku. Metode ini merupakan analisis tingkat lanjut yang bukan hanya membutuhkan logika, tetapi juga rasa, alibi, intuisi, atau bahkan *raw instinct* (Sawirman, 2015:22). Namun, pada tahap pertama saja yang akan dibahas nantinya dalam makalah ini. Dalam makalah ini, memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari masyarakat bahasa (Djajasudarma, 2010:10–11). Menurut Sawirman (2014:7), spirit agar kualitas disarankan sebagai metode utama dalam penelitian humaniora, teks, etnografi, dan sosiologi. Dalam konteks kasus wacana, pendekatan kualitatif bukan hanya berorientasi interpretatif tetapi juga mampu membaca interogasi teks, logika wacana, keseimbangan wacana, perilaku wacana, dan fakta teoritis untuk mengungkap sebuah kebenaran dalam rentang objektivitas yang memadai (Sawirman, 2014:7).

Dalam melihat pergerakan wacana, penulis memakai teori BREAK yang dikemukakan oleh Sawirman. BREAK adalah akronim dari *Basis Wacana, Relasi Wacana, Ekuilibrium Wacana, Aktualisasi Wacana, dan Keberlanjutan Wacana*. Teori BREAK disebut juga dengan teori pergerakan wacana e-135 (Sawirman, 2014:10). Teori BREAK adalah teori yang bertujuan menjelaskan fenomena linguistik seiring dengan melihat pergerakan esensi dan spirit wacana (Sawirman, 2014:43).

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. TEORI BREAK

2.1.1. BASIS WACANA

Basis wacana merupakan orientasi teori BREAK dalam ranah ilmu analisis wacana baik lisan maupun tulisan (Sawirman, 2014:10). Dalam basis wacana, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu (1) posisi wacana; (2) konfigurasi wacana; dan (3) tipe umum pergerakan wacana.

1) Posisi Wacana

Posisi wacana adalah untuk menentukan antara wacana primer dan wacana sekunder (Sawirman, 2014:11). Wacana primer dalam teori ini adalah wacana yang menjadi sentral atau basis perbandingan bagi wacana lainnya. Selanjutnya, wacana sekunder adalah wacana yang dibandingkan atau dikomparasikan dengan wacana primer (Sawirman, 2014:12).

Wacana primer dalam analisis ini adalah kebijakan mengenai Pembangunan Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Sedangkan, wacana sekunder dalam analisis ini adalah berita yang terdapat pada situs <http://pasamanbarat.com/tag/konflik-perkebunan-sawit/> dan <https://www.spi.or.id/pembaruan-agraria-konflik-perkebunan-sawit/>. Yang mana, kedua situs ini sering membahas pembangunan kelapa sawit dan menginformasikan perkembangan pembangunan kelapa sawit.

2) Konfigurasi Wacana

Konfigurasi wacana adalah segala unsur bawaan atau semua elemen struktur internal wacana terutama dari sisi wujud, esensi, dan spirit (Sawirman, 2014:13). Langkah-langkah konfigurasi wacana, sebagai berikut.

a) Wujud Wacana

Wujud wacana adalah forma yang berisi seluk-beluk linguistik yang terkait dengan aktivitas, aksi, dan perilaku manusia baik berupa tipe wacana, jenis klausa, kodus, frasa, kata, intonasi, silaba, bunyi, kontur, panjang teks, dan sejenisnya yang digunakan oleh manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, makhluk lain, atau dimensi lain.

Wacana primer: kebijakan yang pada dasarnya merupakan kebijakan peningkatan produksi menuju pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan transparan. Secara rinci kebijakan tersebut meliputi (1) Pengembangan Perkebunan Rakyat melalui Program Revitalisasi Perkebunan; (2) Pengembangan Produktivitas; (3) Penggunaan dan Penyebaran Bahan Tanaman Unggul; (4) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Terpadu, (5) Pengembangan SDM; (6) Pemanfaatan Limbah dan Hasil Samping; (7) Pengembangan Infrastruktur; (8) Pengembangan Usaha; (9) Pengembangan Kemitraan Usaha; (10) Penerapan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, dan (11) Pengembangan Sistem Informasi.

Wujud wacana primer adalah wacana kebijakan. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan mengenai pembangunan kelapa sawit. Serta, kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk mengatur pembangunan kelapa sawit di Indonesia pada umumnya.

Selanjutnya, wujud wacana sekunder adalah wacana berita. Wacana berita mengenai pembangunan kelapa sawit di daerah. Sebab, wacana tersebut menginformasikan permasalahan maupun perkembangan pembangunan kelapa sawit.

SERIKAT PETANI INDONESIA
TANAH UNTUK PENGGARAP!

TENTANG KAMI | KONTAK

BERANDA BERITA KOLOM ISU UTAMA PUBLIKASI AGENDA MULTIMEDIA PUSDIKLAT ARSIP #HARITANI 2016

You are here: [Home](#) [Info Utama](#) [Analisis](#) Pembaruan Agraria dan Konflik Perkebunan Sawit

ADMIN SPI 11 JULY 2011 SEARCH THIS WEBSITE...

Pembaruan Agraria dan Konflik Perkebunan Sawit

Oleh: Sukardi Bendang *

Sejarah panjang perkebunan di Sumatera Barat identik dengan konflik pertanahan antara pihak perusahaan perkebunan dengan masyarakat di sekitar perkebunan. Di zaman penjajahan Belanda sengketa dan perampasan tanah untuk perkebunan sawit terjadi antara masyarakat Kampung Pinang Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin oleh seorang penghulu adat Dt. Bagindo dari suku Sikumbang. Sengketa ini berujung dengan penangkapan dan pembuangan Dt. Bagindo ke Cilacap hingga akhir hayatnya. Hal yang sama juga terjadi di Kampung Rambah dan Kampung Aur Serumpun (masih di Kinali yang) dipimpin Dt. Jando Lela yang juga dirampas Belanda untuk perkebunan sawit dan penghutunya disiksa.

ARTIKEL TERBARU

- [SPI Resmi Berdiri di Kendal, Jawa Tengah](#)
- [Menuju Kebijakan Pangan Yang Berkeadilan: Refleksi Hari Pangan Sedunia 2016](#)
- [Hari Pangan Sedunia 2016 : Harga Pangan Melambung, Impor Pangan Meningkat dan Jumlah Petani Terus Menurun](#)
- [Tepat di Hari Pangan 2016, SPI Rembang Resmi Berdiri](#)
- [Hari Pangan 2016: Rakyat Berdaulat Pangan, Tolak Perusahaan Transnasional](#)

The screenshot shows the homepage of the website 'PASAMAN BARAT'. At the top, there is a navigation bar with links for HOME, LAPORAN MASYARAKAT, PASAMAN BARAT, VIDEO, BERITA, OPINI, TENTANG, and LOG IN. Below the navigation bar, there is a main content area with several articles. The first article is titled 'Diserobot, Warga Sungai Tanang Datangi Lokasi Lahan' and is dated November 5th, 2014. The second article is titled 'Perdebatan Lingkungan soal Perkebunan Sawit Indonesia' and is dated February 19th, 2013. To the right of the main content area, there is a section for 'CARA MENGIRIM LAPORAN MASYARAKAT' and a 'POLLING' section with the question 'Apakah pandangan anda tentang website pasamanbarat.com?'. The poll options include 'website yang sangat informatif dan paling ditunggu', 'Website favorit saya kategori "Info daerah Pasaman Barat"', 'Saya suka tampilan websitenya', and 'Biasa saja seperti kebanyakan website berita daerah lainnya'.

b) Esensi Wacana

Esensi wacana merupakan kandungan pesan, gagasan, atau makna sebuah wacana (Sawirman, 2014:14). Esensi wacana primer adalah perencanaan mengenai pembangunan kelapa sawit agar lebih baik kedepannya. Esensi wacana sekunder adalah berita mengenai konflik pembangunan kelapa sawit yang tidak berjalan dengan baik.

c) Spirit Wacana

Spirit adalah fondasi dasar untuk membaca intensi, motivasi, maksud, tujuan, orientasi atau motif baik tersembunyi atau bukan, baik bersifat personal atau kelompok, baik bersifat komunikasi sosial maupun antisosial, baik berwatak politis maupun ideologis dan metafisis (Sawirman, 2014:15). Spirit dari wacana primer adalah membuat perubahan yang lebih baik. Sebab, kebijakan atau perencanaan yang diambil untuk pembangunan kelapa sawit merupakan untuk perkembangan dan kebaikan pada semua elemen, baik negara, pemerintahan, masyarakat, produktivitas, serta informasi yang akan mendunia. Artinya, seandainya pembangunan kelapa sawit berhasil, maka pendapatan negara, daerah maupun masyarakat akan meningkat. Kesejahteraan dan keadilan yang merata akan segera terwujud dengan keberhasilan pembangunan kelapa sawit diseluruh daerah yang dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit.

Selanjutnya, spirit dari wacana sekunder adalah informasi yang menunjukkan kebijakan yang telah dikeluarkan tidak berjalan dengan baik di lapangan. Artinya, apa

yang direncanakan Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tidak berjalan dengan baik. Masih ada beberapa pihak yang dirugikan dari pembangunan sawit ini.

3) Tipe Umum Pergerakan

Tipe umum pergerakan pada kedua wacana ini adalah DIDI. Sebab antara esensi dan spirit yang terdapat dalam kedua wacana tidak sejalan, saling bertentangan, dan saling tidak besenerji. Sebab, apa yang diinginkan oleh Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) maupun pemerintah, tidak berjalan dengan baik di lapangan. Lalu, yang berjalan tidak baik tersebut, di informasikan oleh situs online (wacana primer) tersebut. Walaupun, tidak semua informasi yang dipublikasikan merupakan kebobrokan atau konflik, namun dari sekian banyak kasus pembangunan kelapa sawit, yang diinformasikan atau yang diberitakan adalah konflik pembangunan sawit. Baik dengan pemerintah, perusahaan, pembagian hasil yang tidak merata, pembuangan limbah sembarangan, sengketa tanah, maupun petani-petani yang mengeluhkan upah atau pendapatan yang tidak memadai.

2.1.2. RELASI WACANA

Relasi wacana adalah hubungan antarwacana dengan entitas lain, realitas lain, atau wacana lain (Sawirman, 2014:17). Dalam teori BREAK terdapat empat fitur relasi wacana, sebagai berikut.

1. Relasi Tekstual

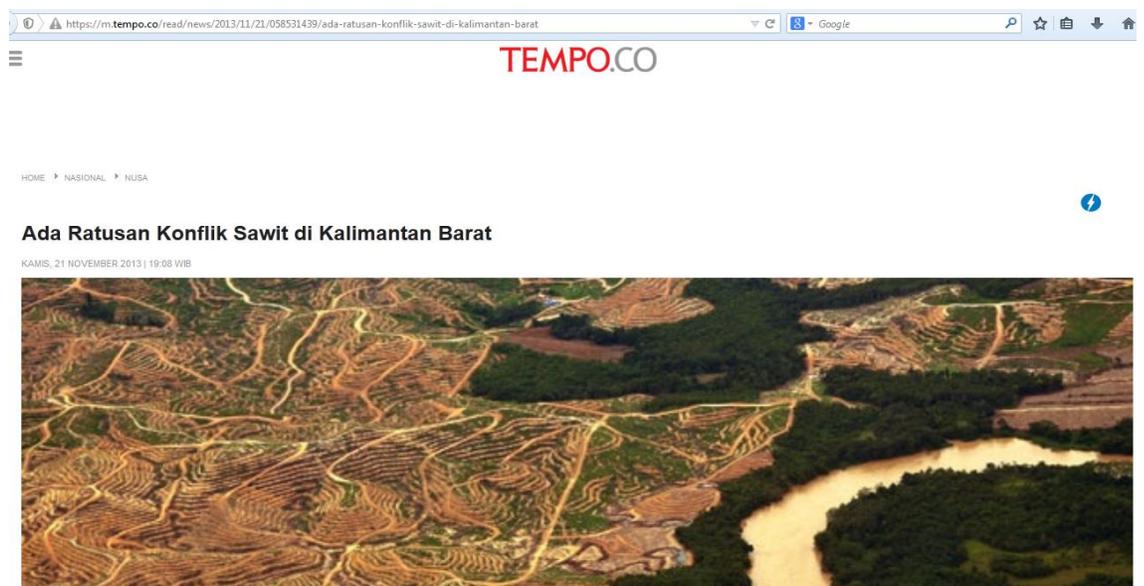
Relasi tekstual dalam teori BREAK dimaknai sebagai komparasi antarteks baik dari sisi wujud, esensi, atau spirit dari teks-teks melalui penelusuran genealogi wacana sembari penggalian proses kognitif dan mental produsen wacana (Sawirman, 2014:17).

Relasi tekstual digunakan untuk komparasi teks atau memperbandingkan wacana diluar wacana primer dan sekunder. Sebagai wacana komparasi atau pembeding diambil dari berita online *kompas.com* dari situs dan *tempo.co*. Berita tersebut juga menginformasikan konflik yang terjadi di lapangan sehubungan dengan pembangunan kelapa sawit di daerah Kalimantan dan Papua. Artinya, kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintahan, tidak berjalan dengan baik di lapangan atau pada prakteknya. Sebab, tidak disatu daerah saja yang terjadi konflik, tetapi pada umumnya konflik pembangunan kelapa sawit banyak terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Situs *compas.com* <http://regional.kompas.com/read/2015/12/10/03442901/Pembangunan.Perkebunan.Sawit.di.Papua.Dinilai.Menggusur.Warga.dari.Tanah.Leluhur>



Situs *tempo.co* : <https://m.tempo.co/read/news/2013/11/21/058531439/ada-ratusan-konflik-sawit-di-kalimantan-barat>.



Pada judul berita tersebut, sudah jelas adanya konflik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Proses pembangunan kelapa sawit tetap berjalan sampai saat sekarang ini, walaupun konflik terjadi di mana-mana dan belum terselesaikan.

2. Relasi Kontekstual

Relasi kontekstual yang dikaitkan dengan teori Dell Hymes, yaitu *SPEAKING*. Bila dihubungkan dengan konsep Dell Hymes bahwa setiap teks memiliki konteks yang disingkatnya dengan *SPEAKING* (*Setting and Scene, Participant, Ends, Act Sequences, Key, Instrumentalities, Norms of Interaction and Interpretation, Genre*). Dalam teori *BREAK*, relasi kontekstual sejajar dengan *inter-SPEAKING*, misalnya antar- *setting*, antarteks yang berbeda, antar-*participant* yang berbeda dan sejenisnya (Sawirman, 2014:19-20).

Inter-SPEAKING kedua wacana tersebut, yaitu: P (*participants*) pada wacana primer adalah PT.Agrowiratama dan Pemerintahan Pasaman Barat. *Participants* pada wacana primer adalah warga Papua, Kalimantan, masyarakat dan petani, dan Serikat Tani Indonesia. *Instrumentalis* wacana primer disampaikan secara tertulis melalui media *online* dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, *instrumentalis* wacana sekunder melalui media *online* maupun cetak.

3. Relasi Faktual

Relasi faktual dalam teori *BREAK* adalah relasi antara muatan isi pesan wacana dengan realitas yang ada di lapangan (Sawirman, 2014:20). Fakta yang terdapat dalam wacana primer maupun sekunder mempunyai tingkat kefaktualan tinggi. Sebab, wacana primer adalah wacana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang ada di perundang-undangan perencanaan pembangunan serta kebijakan. Maka, secara tidak langsung, seharusnya wacana tersebut dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Wacana sekunder berupa wacana yang dikeluarkan yang disebabkan tidak berjalannya kebijakan tersebut di lapangan dan banyak merugikan masyarakat. Sehingga, menyebabkan konflik-konflik pada pembangunan kelapa sawit di berbagai daerah.

4. Relasi Logika

Dalam relasi logika, kedua isi wacana tersebut (baik wacana primer maupun wacana sekunder) keduanya memiliki relasi logika yang dapat berterima. Kedua wacana

mengusung pesan kebaikan, antara perencanaan yang bersinergi dan hak. Sebenarnya, kalau pada praktek kebijakan di lapangan bisa dijalankan dengan baik, tanpa adanya penyusupan-penyusupan atau tindakan kejahatan, maka tidak akan terjadi konflik dan masyarakat maupun petani tidak akan merasa dirugikan.

5. Relasi Ideologi

Relasi ideologi dalam wacana primer maupun wacana sekunder, pada intinya menginginkan kebaikan dan kesetaraan dari taraf ekonomi, produktivitas, dan perkembangan atau kemajuan untuk diri (keluarga/masyarakat), daerah, dan pemerintahan (Indonesia). Hanya saja, wacana sekunder sebenarnya menginginkan hal yang sama, tetapi pada praktek kebijakan tersebut terjadi kecurangan, maka dengan demikian akan terjadi konflik dan penuntutan hak-hak dari petani maupun masyarakat yang dianggap merugikan.

2.1.3 EKUILIBRIUM WACANA

Ekuilibrium wacana merupakan titik atau kondisi rentangan keseimbangan antar-wacana yang dibandingkan. Untuk menghilangkan suatu dominasi wacana, *power*, kiblat, atau sentral wacana tunggal ataupun wacana dominan, hasil analisis yang diperoleh dari relasi tekstual, relasi kontekstual, relasi faktual, logika wacana, dan ideologi wacana perlu dipertimbangkan hadirkan dalam bagian ini selain fitur *rentangan keseimbangan wacana* (Sawirman, 2014:22).

a. Legitimasi Wacana

Legitimasi merupakan aspek atau proses pembenaran wacana terhadap peristiwa, aksi, perilaku, dan proses-proses realitas lainnya yang berstandar pada nilai ilmiah, logika, adat istiadat, otoritas, konvensi, dan sejenisnya (Sawirman, 2014:22-23). Legitimasi kedua wacana benar adanya. Legitimasi pada wacana primer telah disepakati adanya, dan legitimasi pada wacana sekunder memang terjadi berupa protes, konflik serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan.

b. Rentang Keseimbangan Wacana

Rentang keseimbangan wacana, sudah seimbang, wacana berada pada rentang keseimbangan yang tinggi.

2.1.4 AKTUALISASI WACANA

Aktualisasi wacana merupakan proses pembacaan sejak dari perilaku wacana hingga pengkajian efek wacana pada tataran aktual. Efek atau dampak yang dimaksudkan bisa bersifat politis, sosiologis, ideologis, linguistik, dan lain-lain (Sawirman, 2014:24).

a. Perilaku Wacana

Perilaku wacana pada dasarnya berhubungan erat dengan perilaku manusia. Perilaku wacana merupakan bentuk-bentuk aksi yang terlibat dalam wacana yang beroperasi dalam sistem kognitif dan sosial manusia (Sawirman, 2014:24). Perilaku wacana pada kedua wacana muncul berupa pemberitaan di media televisi dan media cetak, baik situs *online* maupun koran nasional dan lokal. Sehingga, dengan adanya kasus serta pemberitaan terhadap kedua wacana, maka masyarakat dan pemerintahan akan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan.

b. Efek Wacana

Efek merupakan dampak dari suatu wacana atau peristiwa yang terjadi dalam realitas secara multi-dimensi. Suatu wacana atau peristiwa juga bisa dinilai memiliki potensi efek ke depan bila efek tersebut belum terjadi atau belum terwujud dalam realitas (Sawirman, 2014:25). Efek dari wacana primer maupun wacana sekunder, memiliki efek yang besar bagi pembaca dan kehidupan masyarakat. Secara tidak langsung, pemilik lahan, petani, masyarakat maupun pemerintahan akan memperhatikan hal-hal atau kasus-kasus ini ke depannya. Agar, tidak terjadi konflik yang sama pada daerah yang sama.

2.1.5 KEBERLANJUTAN WACANA

Keberlanjutan wacana merupakan dimensi strategis sang analisis untuk membaca pergerakan wacana terutama dalam hal adaptasi wacana di masa depan. Bagian ini diharapkan mampu menawarkan solusi dan membaca tipe pergerakan wacana yang akan terjadi di masa depan (Sawirman, 2014:26).

a. Adaptasi Wacana

Adaptasi wacana merupakan kemampuan atau prediksi ilmiah suatu wacana untuk berkembang dan bertahan eksis dalam pergerakan dan perubahan realitas di masa depan (Sawirman, 2014:27). Wacana primer tidak terlalu bertahan lama. Tentunya, dengan adanya konflik seperti ini, kebijakan tersebut akan diperbaiki dan prakteknya di lapangan

akan lebih dipantau oleh pihak yang berkewajiban. Selanjutnya, wacana sekunder juga tidak akan bertahan lama, dengan berhasilnya suatu kebijakan diterapkan di lapangan, maka wacana sekunder akan hilang pula. Artinya, jika wacana primer diperbaiki baik dalam peraturan perundang-undangan maupun pada prakteknya di lapangan. Maka, secara tidak langsung, wacana sekunder akan hilang. Konflikpun akan berhenti, sesuai dengan kebijakan yang terlaksana di lapangan tidak merugikan siapapun.

b. Solusi Wacana

Solusi wacana adalah (beragam) strategi, eksampler, metode, *blue print* atau opini yang ditawarkan oleh analis untuk membangun jejaring strategis dalam upaya untuk mengisi titik kosong (*blind spots*) wacana-wacana yang dianalisis (Sawirman, 2014:28). Solusi untuk wacana primer, lakukan revisi pada pembuatan kebijakan. Adanya revisi kebijakan, tentu akan lebih baik. Solusi dari kedua wacana ini, hendaknya kedua wacana ini dianalisis dengan menggunakan ilmu lainnya, seperti bidang linguistik forensik, hukum, hukum tata kebijakan dan ilmu politik serta ilmu sosial lainnya. Apabila kedua wacana ini dikaji secara mendalam, akan berdampak baik bagi penyelesaian konflik serta isu yang beredar dalam masyarakat.

c. Tipe Perubahan Wacana

Tipe perubahan wacana merupakan bentuk-bentuk perubahan yang terjadi akibat proses pergerakan. Tidak ada perubahan yang muncul tanpa didahului pergerakan walaupun suatu pergerakan tidak selalu mutlak menghasilkan perubahan (Sawirman, 2014:28). Perubahan kedua wacana ini akan tampak apabila terjadinya revisi pada proses pembuatan kebijakan, yang melibatkan semua elemen tanpa menitikberatkan atau tanpa adanya maksud tertentu atau maksud yang terselubung dari pembuat kebijakan tersebut. Selanjutnya, pada prakteknya di lapangan, harus dipantau dengan baik. Hal semacam ini, akan berjalan dengan baik jika tidak ada terjadi kejahatan dalam suatu peristiwa atau suatu kebijakan.

2.2 LINGUISTIK FORENSIK

Konflik pembangunan kelapa sawit yang terjadi, dikarenakan kebijakan tidak berjalan dengan baik di lapangan. Bahasa maupun kebijakan-kebijakan tersebut telah disusupi oleh pelaku kejahatan, yang menyebabkan terjadinya konflik pada pembangunan

kelapa sawit. Untuk mengetahui penyusupan atau pelaku kejahatan melalui bahasa dan kebijakan, hendaknya dilakukan dengan analisis linguistik forensik.

Linguistik itu sendiri berarti bidang ilmu pengetahuan yang memiliki otoritas dalam analisis seluk beluk bahasa, sedangkan kebijakan merupakan kumpulan teks bahasa yang diintituisikan atau dilembagakan dan memiliki dimensi politik beserta kekuasaan (Sawirman, dkk., 2015:67). Ada beberapa variabel konseptual yang perlu difahami dalam melaksanakan analisis kebijakan berbasis linguistik forensik, seperti: (1) analisis orientasi kebijakan; (2) sifat dan karakteristik kebijakan; (3) tingkat bias (penyimpangan) lingual; (4) tingkat efektifitas dan efisiensi kebijakan terhadap aspek yang diregulasikan; (5) basis berfikir pelaku pembuat kebijakan; (6) evaluasi kelemahan kebijakan terkait dengan dinamika aspek yang dikontrol; dan (7) rekomendasi atau solusi untuk kebijakan atau untuk revisi kebijakan. Dalam konteks ini, metode analisis kata, frase, dan klausa merupakan kunci yang sangat diperlukan. Hal ini disebabkan, tingkat penyimpangan dalam suatu kebijakan sering dimainkan pada kata-kata kunci tertentu. Disamping itu, analisis linguistik forensik juga harus memahami aspek atau objek yang diregulasikan beserta sifat-sifat masalahnya secara komprehensif (Sawirman, dkk., 2015:67).

Pada metode sudah dijelaskan bagaimana memecahkan masalah bahasa dan kebijakan ini. Pertama yang perlu ditemukan adalah bias bahasa atau lingual dan potensi bias dari kebijakan.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang pada dasarnya merupakan kebijakan peningkatan produksi menuju pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan transparan. Secara rinci kebijakan tersebut meliputi (1) Pengembangan Perkebunan Rakyat melalui Program Revitalisasi Perkebunan; (2) Pengembangan Produktivitas; (3) Penggunaan dan Penyebaran Bahan Tanaman Unggul; (4) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Terpadu, (5) Pengembangan SDM; (6) Pemanfaatan Limbah dan Hasil Samping; (7) Pengembangan Infrastruktur; (8) Pengembangan Usaha; (9) Pengembangan Kemitraan Usaha; (10) Penerapan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan, dan (11) Pengembangan Sistem Informasi.

Terlebih dahulu, mari di analisis melalui bahasanya, sebagai berikut.

(1) Pengembangan Perkebunan Rakyat melalui Program Revitalisasi Perkebunan;

1

2

Pada frasa (1) menyatakan pengembangan perkebunan rakyat. Artinya, kalau diartikan secara harfiah (KBBI, 2015) kata *pengembangan* berasal dari kata *kembang* yang diberi afik peng- dan afik -an. *Kembang* adalah terengah-engah; tidak maju, sedangkan *pengembangan* adalah orang yang mengembangkan; perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan. Lalu, *perkebunan* adalah hal berkebun; perusahaan yang mengusahakan kebun; tanah yang dijadikan kebun. Selanjutnya *rakyat* adalah penduduk suatu negara; orang kebanyakan; orang biasa; anak buah; bawahan. Maka, pada kebijakan (1) ini, dari artinya saja bisa langsung disusupi pelaku kejahatan. Sebab, pada dasarnya frasa (1) bisa berarti: (a) pengembangan perkebunan tersebut adalah milik perusahaan; (b) rakyat merupakan anak buah atau bawahan. Artinya, rakyat tidak menjadi pemilik maupun orang yang berhak atas perkebunan kelapa sawit tersebut. Dari analisis secara harfiah ini, kata-kata telah dipermainkan oleh pembuat kebijakan atau pelaku kejahatan melalui bahasa. Sebab, ia tidak memakai kata atau frasa *pemilik tanah*. Artinya, tanah milik rakyat ini bisa saja dikelola oleh pengusaha/perusahaan atau pemerintah, lalu menjadikan rakyat sebagai bawahannya. Selanjutnya frasa (2), kata *program* adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dsb), sedangkan *revitalisasi* adalah proses, cara, perbuatan menghidupkan atau mengiatkan kembali, *perkebunan* adalah hal berkebun; perusahaan yang mengusahakan kebun; tanah yang dijadikan kebun. Pada frasa (2) ini, tidak terlihat adanya penyusupan bahasa. Namun, pada awal kalimat (frasa 1) telah disusupi, secara tidak langsung kebijakan pada nomor (1) telah disusupi oleh pelaku kejahatan.

(2) Pengembangan Produktivitas

(3) Penggunaan dan Penyebaran Bahan Tanaman Unggul

Pada kebijakan (2) dan (3), agaknya tidak terjadi penyusupan kata-kata ataupun bahasa. Sebab, bahasanya lugas dan tegas.

(4) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Terpadu

Secara harfiah, *kendali* adalah kekang, diberi afik peng- dan -an, yang berarti proses atau cara, pembuatan pengendalian; pengekangan. Kata *organisme* adalah segala

jenis makhluk hidup; susunan yang bersistem dari berbagai bagian jasad hidup untuk suatu tujuan tertentu. Kata *organisme pengganggu* berarti organisme yang menempel pada permukaan yang terdapat dilingkungan perairan seperti jala, pipa air, sangkar, dan perahu yang menyebabkan gangguan dan kerusakan pada tempat yang ditempelinya, seperti kerang-kerangan. Pada kebijakan (4) ini, agaknya tidak ada penyusupan pelaku kejahatan. Sebab, ini ditujukan untuk tanaman. Namun, jika ditujukan untuk manusia, (sebab, bahasa yang dipakai adalah organisme, yang tidak hanya untuk hewan atau tanaman tetapi ditujukan kepada makhluk hidup termasuk manusia) tentu, bahasa yang dipakai telah terjadi penyusupan pelaku kejahatan. Sebab, akan dilakukan pengekanan terhadap perusak/pengganggu tanaman. Bisa saja, kalau diartikan apabila tanaman kelapa sawit tersebut telah ditanami oleh pemerintah, apabila dirusak oleh masyarakat/rakyat (sebab, tanah yang ditanami kelapa sawit tersebut tanahnya), maka secara tidak langsung perusak/rakyat tersebut akan dikekang. Artinya, akan ditindaklanjuti dengan pengekanan/dengan cara mengendalikan rakyat tersebut.

(5) Pengembangan SDM

(6) Pemanfaatan Limbah dan Hasil Samping

(7) Pengembangan Infrastruktur

(8) Pengembangan Usaha

(9) Pengembangan Kemitraan Usaha

(10) Penerapan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

(11) Pengembangan Sistem Informasi.

Pada kebijakan nomor (7), (8), (9), dan (10) tentang pengembangan infrastruktur, usaha, kemitraan usaha, dan pengembangan sistem informasi kalimat atau frasanya tidak jelas hendak ditujukan kemana, pada siapa, dan untuk siapa. Maka, secara tidak langsung kebijakan nomor (7), (8), (9), dan (10) bisa disusupi oleh pelaku kejahatan.

Maka, dari hasil analisis bahasa secara harfiah, kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), kata/kalimat dari kebijakan tersebut terjadi penyusupan atau pelaku kejahatan dalam pembuatan kebijakan pembangunan kelapa sawit. Dengan demikian, pada prakteknya mengenai pembangunan kelapa sawit, juga bisa dikatakan telah terjadi pelaku kejahatan. Hal tersebut disebabkan,

pada isu dan konflik-konflik yang sudah berkembang. Secara tidak langsung, pelaku kejahatan akan lebih mudah menipu, menyusup, dan melakukan kejahatan pada prakteknya di lapangan, yang disebabkan oleh kebijakan yang dikeluarkan merupakan bahasa yang bisa dimanipulasi artinya secara harfiah.

Walaupun demikian, linguistik forensik tidak hanya berhenti sampai disini. Sudah dikemukakan pada teori dan metode pada latar belakang, bahwa seorang linguis yang bergerak pada linguistik forensik, harus turun ke lapangan secara langsung. Maka, analisis bahasa dan kebijakan yang berbasis teori BREAK dan Linguistik Forensik mengenai Bahasa dan Kebijakan Pembangunan Kelapa Sawit di Indonesia, dicukupkan sampai disini. Sebab, jika melakukan analisis secara langsung ke lapangan maka memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup banyak.

3. PENUTUP

Teori BREAK merupakan teori yang membahas esensi dan spirit wacana tanpa batas, artinya dalam memaknai wacana, diperluka ilmu lain untuk keberlangsungan teori tersebut, agar wacana tersebut bisa diteliti dengan akurat. Dalam tulisan ini, teori BREAK dibantu atau disandingkan dengan linguistik forensik. Esensi wacana primer adalah perencanaan mengenai pembangunan kelapa sawit agar lebih baik kedepannya. Esensi wacana sekunder adalah berita mengenai konflik pembangunan kelapa sawit yang tidak berjalan dengan baik.

Spirit dari wacana primer adalah membuat perubahan yang lebih baik. Sebab, kebijakan atau perencanaan yang diambil untuk pembangunan kelapa sawit merupakan untuk perkembangan dan kebaikan pada semua elemen, baik negara, pemerintahan, masyarakat, produktivitas, serta informasi yang akan mendunia. Artinya, seandainya pembangunan kelapa sawit berhasil, maka pendapatan negara, daerah maupun masyarakat akan meningkat. Kesejahteraan dan keadilan yang merata akan segera terwujud dengan keberhasilan pembangunan kelapa sawit di seluruh daerah. Sedangkan, spirit dari wacana sekunder adalah informasi yang menunjukkan kebijakan yang telah dikeluarkan tidak berjalan dengan baik di lapangan. Artinya, apa yang direncanakan Direktorat Pangan Dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tidak berjalan

dengan baik. Masih ada beberapa pihak yang dirugikan dari pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Selanjutnya, pada linguistik forensik, terjadi penyusupan atau tindak pelaku kejahatan dalam pembuatan dan penetapan kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Sehingga, pada prakteknya di lapangan, pembangunan perkebunan kelapa sawit banyak terjadi konflik. Serta banyaknya media menginformasikan permasalahan sawit ini. Dari dulu sampai sekarang, konflik pembangunan kelapa sawit tidak berhenti. Selalu terjadi permasalahan dan isu-isu yang berkembang dikalangan masyarakat maupun pemerintahan. Oleh sebab itu, konflik serta isu yang berkembang menjadi cikal bakal pertikaian dan menghambat pembangunan kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Haryana, dkk. 2010. *Naskah Kebijakan (Policy Paper) Kebijakan dan Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia Secara Berkelanjutan dan Berkeadilan*. Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas.
- Dani, J. 2016. "Pembangunan Perkebunan Sawit di Papua Dinilai Mengusur Warga dari Tanah Leluhur" dalam *kompas.com* <http://regional.kompas.com/read/2015/12/10/03442901/Pembangunan.Perkebunan.Sawit.di.Papua.Dinilai.Mengusur.Warga.dari.Tanah.Leluhur> di akses pada 03 November 2016, Pukul 08.00 WIB.
- Departemen Pendidikan. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fatimah, Djajasudarma. 2010. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sawirman, dkk. 2015. *Linguistik Forensik (Volume 2)*. Padang: Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas.
- Sawirman. 2014. *e135 Reader: Media Meliput Teror (Episode Usamah Bin Ladin)*. Padang: Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Andalas Padang.
- Sembiring, J. 2009. "Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia." dalam *Jurnal Hukum* No 3. Vol 16 Juli 2009.
- Sukardi Bendang. 2011. "Pembaruan Agraria dan Konflik Perkebunan Sawit" dalam <https://www.spi.or.id/pembaruan-agraria-konflik-perkebunan-sawit/> di akses pada 30 Oktober 2016, Pukul 22.00 WIB.

Tempo.co. 2013. “Ada Ratusan Konflik Sawit di Kalimantan Barat” dalam <https://m.tempo.co/read/news/2013/11/21/058531439/ada-ratusan-konflik-sawit-di-kalimantan-barat> di akses pada 20 Mei 2022, pukul 22.30 WIB.

Anonim. <http://pasamanbarat.com/tag/konflik-perkebunan-sawit/> di akses pada 30 Oktober 2016, Pukul 22.14 WIB.